

Judul : Maju Mundur Pembahasan RUU Tax Amnesty: DPR Tuntut Pemerintah Buka Data Calon Penerima Ampunan
Tanggal : Kamis, 03 Maret 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 13

Maju Mundur Pembahasan RUU Tax Amnesty DPR Tuntut Pemerintah Buka Data Calon Penerima Ampunan

BANYAK anggota DPR yang masih ragu mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak. Mereka curiga, kebijakan tersebut memiliki agenda lain, selain untuk mendongkrak pendapatan negara.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Nizar Zahro mengungkapkan, banyak wakil rakyat ragu pengampunan pajak atau *tax amnesty* mampu memberikan kontribusi pendapatan negara yang signifikan. Hal itu disinyalir menjadi salah satu alasan DPR tak mau terburu-buru membahasnya.

"Apakah benar *tax amnesty* akan memberikan kontribusi yang besar? Kita mau pemerintah buka data siapa saja calon penerimanya,

agar semua jelas. Kalau kita mau memberikan pengampunan, wajar kalau kita tahu siapa yang diberikan ampunan," kata Nizar kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Nizar mengaku heran dengan sikap pemerintah yang sudah pesimis kebijakan *tax amnesty* sulit diterapkan tahun ini. Menurutnya, sikap itu malah bisa menimbulkan kecurigaan bahwa *tax amnesty* memiliki muatan lain.

"Kalau tujuannya murni untuk negara, seharusnya pemerintah yakin kebijakan itu tidak akan terhambat," cetusnya.

Nizar meminta, pemerintah untuk lebih gencar lagi mensosialisasikan rencana penerapan pengampunan pajak ke masyarakat. Jangan sampai nanti ketika

kebijakan itu, diterapkan menimbulkan rasa ketidakadilan.

Nizar mengaku, sampai saat ini pihaknya belum berani memastikan kapan RUU Pengampunan Pajak akan selesai. Sebab, sampai saat ini RUU tersebut masih di tangan pimpinan Dewan.

Secara prosedur, terang Nizar, dari pimpinan dewan, draft RUU Pengampunan Pajak akan diserahkan ke di Badan Musyawarah untuk diusulkan ke rapat Paripurna. Setelah nanti disampaikan di Paripurna, baru disampaikan ke anggota dewan untuk dibahas. Dari sini nanti baru ketahuan, kapan RUU Pengampunan Pajak ditargetkan selesai.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengaku tidak mau terburu-

ru-buru membahas RUU Pengampunan Pajak. "Kami di Fraksi Demokrat masih mempelajari draft RUU Pengampunan Pajak. Kami juga akan bawa regulasi ini ke DPP (Partai Demokrat-red) mengingat aturan ini sensitif di masyarakat," kata Agus.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan skema pemotongan anggaran non prioritas untuk mengamankan APBN bila kebijakan pengampunan pajak atau *tax amnesty* tidak bisa dilaksanakan.

"Pemerintah akan mengajukan susunan anggaran baru lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP)," ujar Bambang. ■ **MEN**